

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tumbang Masao merupakan sebuah desa yang terletak di pedalaman Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya berada di Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya. Desa ini tepat berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan memiliki Luas wilayah sebesar 254 Km² (dua ratus lima puluh empat kilometer persegi). Desa yang dihuni oleh Suku Dayak Bakumpai ini terdiri dari sembilan RT. Desa Tumbang Masao mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Makap

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalapeh Baru

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas⁴⁶

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2021, Desa Tumbang Masao memiliki jumlah penduduk sebanyak 1957 (seribu sembilan ratus lima

⁴⁶Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No 8 TAHUN 2014 tentang Penetapan Desa. Bagian kedua Pasal 15.

puluh tujuh) jiwa. Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) yang terdiri dari 1023 (seribu dua puluh tiga) laki-laki dan 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) perempuan. Persentase penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 52,27% (lima puluh dua koma dua puluh tujuh persen), dan berjenis kelamin perempuan 47,72% (empat puluh tujuh koma tujuh puluh dua persen).

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KETERANGAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Laki-Laki	1023	52,273%
2	Perempuan	934	47,726%
Total		1957	100%

Sumber : Data Profil Desa⁴⁷

2. Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk asli Desa Tumbang Masao adalah beragama Islam. Meski begitu di Desa Tumbang Masao juga terdapat beberapa orang dengan agama selain Islam. Mereka adalah para pendatang yang kemudian menetap disana karena beberapa faktor seperti bekerja, dan adanya hubungan perkawinan.

Oleh karena itu, berdasarkan persentase pemeluk agama mayoritas masyarakat Desa Tumbang Masao adalah beragama Islam.

Adapun fasilitas atau tempat ibadah berdasarkan agama adalah sebagai berikut:

⁴⁷Data statistik tahun 2021 tentang Desa Tumbang Masao. Diperoleh di kantor Desa Tumbang Masao.

Tabel 4.2 Fasilitas Tempat Ibadah di Desa Tumbang Masao

NO	FASILITAS IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	2
2	Musholla	1
3	Gereja	0
4	Pura	0
5	Wihara	0

Sumber : Data Profil Desa⁴⁸

3. Fasilitas Desa

a. Lembaga Pendidikan

Program pendidikan merupakan sebuah wadah untuk mengembangkan potensi dan bakat seseorang. Mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap orang agar terciptanya generasi yang berprestasi dan berilmu, karena dampak dari minimnya pendidikan adalah sempitnya wawasan dan pola pikir serta lemahnya mental. Tak heran jika Pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya.

Desa Tumbang Masao selalu mengupayakan kenyamanan masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan dengan selalu meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Desa Tumbang Masao seperti menyediakan fasilitas yang layak, serta selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam aspek pendidikan.

⁴⁸*Ibid.*

Desa Tumbang Masao memiliki lembaga pendidikan formal dan non-formal. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Lembaga Pendidikan Formal di Desa Tumbang Masao

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1	PAUD	2
2	TK	3
3	SD	3
4	SMP	1
5	SMA	1
Total		10

Sumber: Data Profil Desa⁴⁹

PAUD 1	SDN 1 Tumbang Masao
PAUD 2	SDN 2 Tumbang Masao
TK Permata Hati	SDN 3 Tumbang Masao
TK Tunas Baru 1	SMPN 2 Sumber Barito
TK Tunas Baru 2	SMAN 2 Sumber Barito

Tabel 4.4 Lembaga Pendidikan Non-Formal di Desa Tumbang Masao

No	LEMBAGA PENDIDIKAN NON-FORMAL	JUMLAH
1	Madrasah Ibtidaiyyah	2
Total		2

Sumber: Data Profil Desa⁵⁰

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

Madrasah Ibtidaiyah Tumbang Masao

Madrasah Al- Hidayah Tumbang Masao

b. Sarana Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan hal terpenting dalam menciptakan taraf hidup yang lebih baik, oleh karena itu Desa Tumbang Masao menyediakan Posyandu untuk masyarakatnya sebagai wadah pelayanan kesehatan. Di posyandu ini juga terdapat tenaga ahli kesehatan yang bertugas untuk melayani masyarakat.

Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akan dengan mudah mendapatkan pelayanan medis karena posyandu yang disediakan melayani masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya.

Fisik bangunannya yang juga tergolong nyaman dan layak pakai untuk pelayanan kesehatan juga mendukung dalam kelancaran proses pelayanan medis. Tempat yang bersih dan terjaga ini bukti bahwa terjaminnya mutu penyediaan sarana kesehatan.

c. Fasilitas Olahraga

Olahraga merupakan kegiatan umum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan olahraga ini khususnya di Desa Tumbang Masao menjadi sebuah rutinitas harian yang selalu dilakoni masyarakat. Seperti bermain voli, bulu tangkis, sepak bola, tenis meja hingga olahraga lain yang diminati oleh masyarakat.

Oleh karena itu Desa Tumbang Masao berupaya menyediakan fasilitas olahraga untuk menyalurkan minat dan bakat masyarakat Desa Tumbang Masao.

Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tabel fasilitas olahraga yang ada di Desa Tumbang Masao berikut ini:

Tabel 4.5 Fasilitas Olahraga Di Desa Tumbang Masao

NO	FASILITAS OLAH RAGA	JUMLAH
1	Voli	4
2	Sepak Bola	2
3	Bulu Tangkis	3
Total		9

Sumber: Data Profil Desa⁵¹

4. Kondisi Perekonomian Masyarakat

Sebagai desa yang terletak di pedalaman hutan dan jauh dari keramaian ini, Bisa dikatakan bahwa seluruh masyarakat Desa Tumbang Masao ini hanya mengandalkan eksistensi Sungai Barito dan hutan sebagai mata pencaharian utama. Mulai dari menangkap ikan, berladang, berkebun, tukang kayu, pedagang, hingga menambang emas dengan bantuan mesin atau dengan cara yang masih tradisional yang disebut oleh masyarakat setempat dengan mendulang. Khususnya di Desa Tumbang Masao meski banyak bidang yang bisa menjadi sumber mata pencaharian masyarakat

⁵¹*Ibid.*

tetapi tetap saja sumber usaha yang paling banyak dilakoni didominasi pada sektor pertanian dan penambang emas tradisional.

Tumbang Masao merupakan sebuah desa yang masih belum bisa dikatakan sejahtera secara keseluruhan. Akses transportasi yang bisa digunakan untuk menuju desa ini pun hanya bisa melewati jalur air yang memakan waktu kurang lebih tujuh jam menggunakan perahu mesin atau kelotok dari ibu kota Kabupaten Murung Raya.

Jarak tempuh ke kota yang cukup jauh juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, contohnya dalam hal harga sandang pangan yang relatif mahal.

Harga barang juga menyesuaikan dengan keadaan alam. Saat debit air Sungai Barito naik maka harga barang akan sedikit terjangkau karena kapal-kapal agen barang dari kota akan dengan mudah dan memakan waktu yang lebih cepat menyusuri sungai untuk memasok barang dagangannya kepada para pedagang eceran dikampung.

Sedangkan jika debit air Sungai Barito surut maka harga barang akan lebih mahal karena kapal-kapal agen barang tidak bisa memasok barang untuk para pedagang setempat, sehingga para pedagang setempat harus memutar otak untuk mencari jalan keluar sendiri jika barang dagangnya habis. Para pedagang lokal akan menggunakan jasa taksi perahu mesin untuk berangkat ke kota untuk mencari barang yang akan dijual kembali nantinya. Hal ini jelas memakan waktu dan biaya lebih dibandingkan

dengan membeli kepada para kapal agen yang datang ke kampung-kampung untuk memasok barang dengan harga yang sama dengan dikota.

Dengan keadaan Desa Tumbang Masao yang jauh dari kota ini tentunya sangat mempengaruhi perekonomian masyarakatnya karena mengikuti dengan sumber mata pencaharian mereka yang sesuai dengan lokasi dan potensi alam desa nya.

Berikut peneliti uraikan gambaran kondisi perekonomian masyarakat di Desa Tumbang Masao sesuai dengan profesi atau jenis pekerjaan masyarakat.

Tabel 4.6 Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Tumbang Masao

NO	JENIS PEKERJAAN	PERSENTASE
1	Tani	43.33%
2	Pegawai	3.47%
3	Pedagang	4.70%
4	Penangkap Ikan	3.68%
5	Penambang Emas	25.55%
6	Tukang Kayu	5.11%
7	Jasa Angkutan Darat	1.02%
8	Jasa Angkutan Sungai	7.72%
9	Lainnya	5.42%
Total		100%

Sumber : Data Profil Desa⁵²

⁵²*Ibid.*

5. Kondisi Masyarakat di Desa Tumbang Masao

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, pembangunan kemasyarakatan, dan seluruh proses yang menghasilkan perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Pembangunan berkelanjutan pada lingkungan hidup memerlukan keterpaduan antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber buatan agar tepat guna. Oleh sebab itu maka setiap keputusan pembangunan harus melalui berbagai pertimbangan yang menyangkut pembangunan tersebut.

Desa Tumbang Masao adalah seperti kebanyakan desa dipedalaman pada umumnya yaitu masyarakat dengan perekonomian golongan menengah kebawah. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Desa Tumbang Masao adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Masyarakat Desa Tumbang Masao jika ditinjau dari latar belakang pendidikannya sekarang sudah menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Bahkan ada juga yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Strata Satu (S1). Tetapi kebanyakan anak muda masyarakat Desa Tumbang Masao hanyalah tamatan SMA. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat perekonomian masyarakat sehingga banyak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika kebutuhan ekonomi sulit terpenuhi maka secara otomatis kebutuhan pendidikan pun akan terbengkalai.

Oleh karena itu banyak anak muda yang putus sekolah dan memutuskan untuk bekerja membantu orang tua mereka. Akibat dari banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya banyak anak sekolah yang bekerja sepulang dari sekolahnya. Ada yang membantu orang tuanya berladang dan ada yang menjadi buruh angkut bagi para pedagang besar yang membeli barang dari kapal agen.

Tingkat pendidikan di Desa Tumbang Masao memang tergolong cukup baik, khususnya pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyak orang tua yang tetap menyekolahkan anaknya meskipun dengan keadaan ekonomi yang tergolong sulit.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kondisi pendidikan masyarakat Desa Tumbang Masao pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7 Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Tumbang Masao

No	Keterangan	persentase
1	Penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf	1%
2	Penduduk tidak tamat SD/sederajat	2%
3	Penduduk tamat SD/sederajat	20%
4	Penduduk tamat SMP/sederajat	22%
5	Penduduk tamat SMA/sederajat	48%
6	Penduduk tamat D3	1%
7	Penduduk tamat S1	5%
8	Penduduk tamat S2	1%
Total		100%

Sumber : Data Profil Desa⁵³

Tingginya persentase pendidikan warga yang berlatar belakang SMA atau sederajat, menandakan bahwa tingginya kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan. Akan tetapi keadaan masyarakat yang memang banyak berpenghasilan rendah membuat warga takut tak mampu untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Adanya warga yang berpendidikan Strata Satu (S1) diantaranya adalah anak-anak yang orang tuanya tergolong mampu dan memiliki sejumlah sumber penghasilan seperti perkebunan luas, kebun karet, penambang emas lokal, pedagang, dan PNS.

⁵³*Ibid.*

b. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Akal dan jasmani yang sehat merupakan sebuah karunia Tuhan yang sangat berarti bagi setiap manusia. Kesehatan merupakan bagian penting dalam memenuhi indikator kesejahteraan masyarakat dan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping sandang, pangan, dan papan.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat maka Desa Tumbang Masao menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten dan berperan aktif untuk turut serta melakukan tugas dan kewajibannya, yaitu untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Disamping menyediakan tenaga pelayanan medis, para perangkat desa juga berupaya untuk memenuhi dan memberikan fasilitas yang mendukung kinerja mereka. Seperti menyediakan tempat tinggal yang layak, dan beberapa faktor pendukung lainnya seperti alat transportasi darurat milik desa.

Sejak dahulu tingkat kematian masyarakat di Desa Tumbang Masao tergolong lumayan tinggi yang disebabkan keterlambatan mendapatkan perawatan medis yang mumpuni karena harus menggunakan perahu mesin ke kota yang memerlukan waktu yang cukup lama. Tak jarang hal yang tak diinginkan terjadi, seperti pasien dengan masalah pada saat melahirkan meninggal bersamaan dengan bayinya

yang masih dalam kandungan karena terlambat mendapatkan perawatan, atau orang dewasa dengan riwayat penyakit jantung yang tak terselamatkan karena kurangnya alat medis yang ada di desa, ditambah lagi karena jauhnya jarak tempuh ke rumah sakit di kota dan tidak adanya alat transportasi yang lebih cepat dari perahu motor. Oleh karena itu, Pemerintah desa mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapi masyarakat desanya. Pemerintah desa berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, salah satu bukti nyata kebutuhan masyarakat yang sekarang sudah terealisasi adalah adanya sarana transportasi cepat untuk akses darurat ke kota. yaitu tersedianya *speed boat*.

Tersedianya *speed boat* ini mempermudah jalan bagi masyarakat setempat yang berkepentingan atau ada hal yang bersifat darurat dan mendesak. Pemerintah desa tak hanya menyediakan *speed boat* tetapi juga menggaji seorang sopir yang handal untuk bertanggung jawab dalam membantu masyarakat.

Untuk indikator kesehatan, indikator yang mewakili dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah umur harapan hidup waktu lahir. namun bila ditanya lebih lanjut, bagaimana cara meningkatkan umur hidup, sulit dijawab dengan pasti.

Oleh karena itu tampaknya diperlukan serangkaian indikator kesehatan lain yang diperkirakan berdampak pada kesehatan yang juga meningkatkan umur harapan hidup waktu lahir.

Berikut adalah beberapa indikator yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Desa Tumbang Masao yang dapat mewakili bagaimana tingkat kesehatan masyarakat Desa Tumbang Masao pada kurun waktu 2020/2021:

Tabel 4.8 Indikator Kesehatan Masyarakat di Desa Tumbang Masao Tahun 2020/2021

NO	INDIKATOR	PERSENTASE
1	Angka Kematian Bayi	0,2%
2	Angka Kematian Ibu	-
3	Angka Harapan Hidup	99,8%
4	Persentase Persalinan Oleh Tangan Medis	100%

Sumber: Data Profil Desa⁵⁴

Tabel diatas menunjukan bahwa taraf kesehatan masyarakat Tumbang Masao cukup baik. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang tenaga medis sekaligus bidan di Desa Tumbang Masao yaitu Jumiarti S. Keb yang menjelaskan bahwa tidak adanya penurunan kesehatan yang diakibatkan kekurangan gizi atau kematian bayi dan ibu hamil, hal ini disebabkan hampir seluruh masyarakat Desa Tumbang Masao dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi. Dalam proses kelahiran juga sudah sedikit yang hanya menggunakan tabib (dukun bayi) dan masyarakat sudah mulai percaya untuk beralih ke bidan, dan mudahnya akses menuju rumah sakit di kota membuat menurunnya kasus meninggal karena terlambat mendapatkan pertolongan medis , dan juga masyarakat yang

⁵⁴*Ibid.*

sudah mengikuti kemajuan zaman serta mudahnya mengakses jaringan internet untuk mengetahui informasi tentang kesehatan yang sebagian sudah disampaikan oleh tenaga medis yang ada di Desa Tumbang Masao.⁵⁵

c. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari kepala rumah tangga ataupun pendapatan anggota rumah tangga.

Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan seperti: pangan, kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun pendidikan serta kebutuhan lainnya yang bersifat material. Tujuan akhir program pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

Tingkat pendapatan tersebut kerap digunakan sebagai indikator tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu komunitas. Namun, bila dilihat lebih jauh peningkatan pendapatan tersebut belum menjamin perbaikan kesejahteraan anggota masyarakat luas karena tingkat pendapatan yang bervariasi antar rumah tangga sesuai dengan tingkat penguasaan sumber daya dan kemampuan mengelolanya.

⁵⁵Jumiarti S. Keb, Bidan Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao 12 Januari 2022.

Masyarakat di Desa Tumbang Masao mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pedagang, dan penambang emas tradisional. Hal ini dikarenakan hampir seluruh masyarakat di Desa Tumbang Masao memiliki lahan yang luas serta tanah yang subur untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Ada yang menggunakan untuk bercocok tanam, dan ada juga yang mengelola lahan nya untuk menambang emas sebagai sumber pendapatan.

Pengelolaan lahan tersebut tergantung dengan keinginan dan kemampuan pemiliknya dalam mengelolanya. Dalam hal pendapatan maka pemilik lahan yang luas memiliki sumber pendapatan lebih dibandingkan masyarakat lain yang tidak memiliki lahan.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan mencantumkan tabel tentang perkiraan pendapatan masyarakat Desa Tumbang Masao sebagai berikut:

Tabel 4.9 Perkiraan Besaran Pendapatan Masyarakat Desa Tumbang Masao Menurut Profesi

No	Profesi	Pendapatan Bersih Perbulan
1	Petani, Penangkap ikan, Penyadap Karet	Rp.500.000.00–Rp.1.000.000.00
2	Pedagang	Rp.1.000.000.00–Rp.5.000.000.00
3	Penambang Emas Tradisional	Rp.1.000.000.00–Rp.3.000.000.00

Sumber: Data Profil Desa⁵⁶

⁵⁶*Ibid.*

d. Struktur Pemerintahan Desa

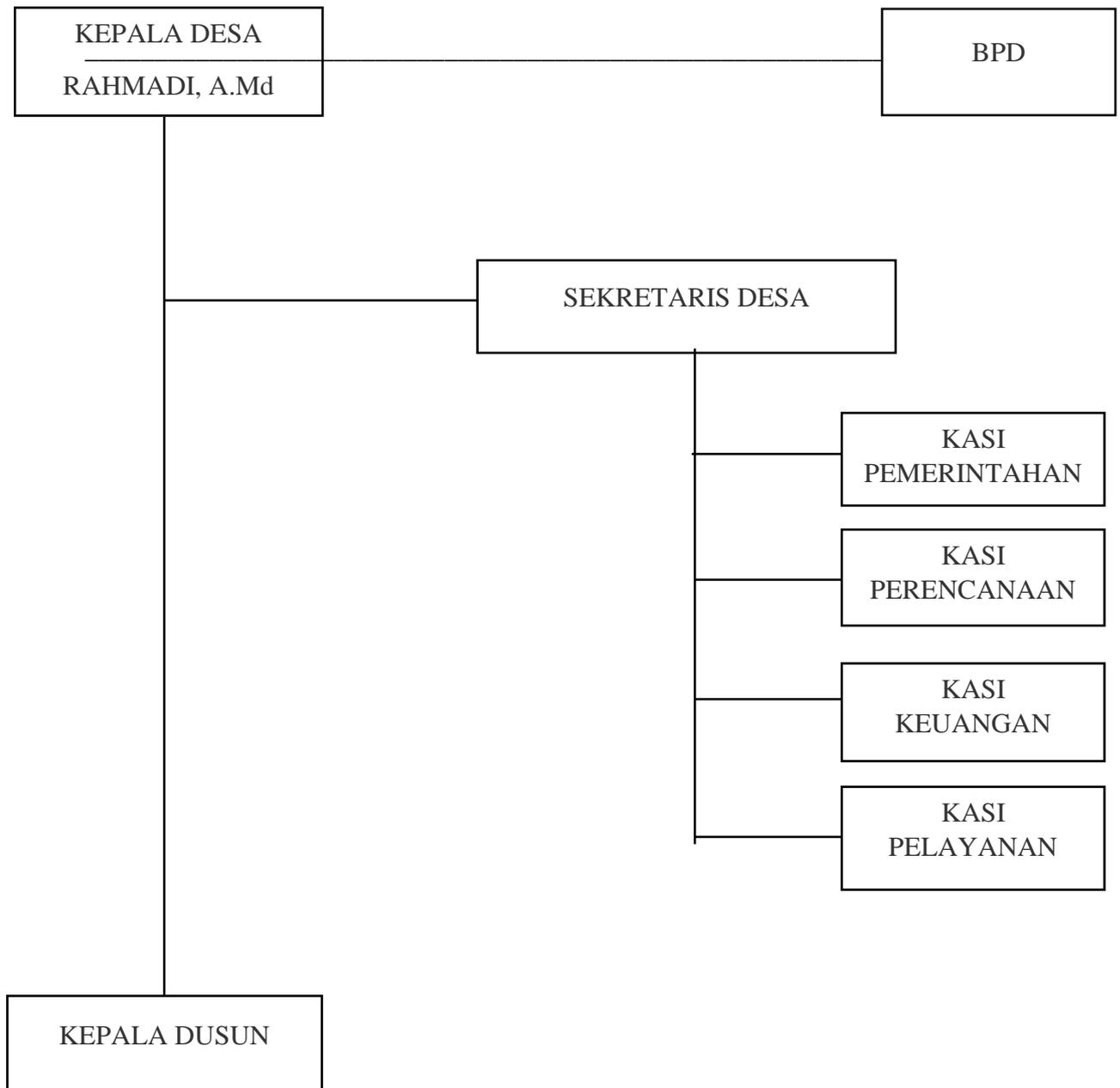
Desa Tumbang Masao sebagai salah-satu desa yang termasuk dalam kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentunya juga memiliki tatanan kepengurusan desa.

Desa Tumbang Masao memiliki kepala desa yang bernama Rahmadi, A.Md, dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, bendahara desa, para anggota BPD dan perangkat desa lainnya.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menerangkan bagaimana struktur kepengurusan Pemerintah Desa Tumbang Masao berikut ini:

Struktur Pemerintah Desa Tumbang Masao

Sumber: Data Struktur Pemerintah Desa Tumbang Masao



B. Penyajian Data

1. Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap para informan di Desa Tumbang Masao, dalam laporan ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

Informan Pertama:

Nama : Kaharano Abda. S.Pd.

Pendidikan : S-1 Ilmu Sejarah

Pekerjaan/Jabatan : Bendahara Desa Tumbang Masao

Alamat : Desa Tumbang Masao, Rt. 08.

No HP : 085386216509

Menurut informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya, bagaimana proses penentuan besaran dana yang diterima oleh desa, serta Bagaimana sistem pengelolaan dan proses penentuan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Masao, Informan memberikan pernyataan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya?

Informan memberikan penjelasan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tumbang Masao dalam penggunaannya terbagi kebeberapa bidang seperti Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan untuk Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ditambah lagi dalam pembagiannya dana yang diterima juga diprioritaskan untuk operasional pemerintahan desa dan tunjangan aparatur desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima memang diperuntukkan sebagai dana pembangunan. Pembangunan yang dimaksud dalam pembangunan Desa Tumbang Masao adalah pembangunan dalam sektor bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) nya dan upaya-upaya terciptanya kesejahteraan desa melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), serta bangunan fisik.

Namun, perlu diketahui bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tumbang Masao jika dilihat dari jumlah besaran dana yang diterima dan dikelola sangat terbatas sebagai dana untuk pembangunan. Selain jumlah besaran dana yang terbatas juga karena dana yang diterima juga diprioritaskan untuk operasional pemerintahan desa dan tunjangan aparatur desa.⁵⁷

⁵⁷Kaharano Abda, Bendahara Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao 29 September 2021.

Menurutnya penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang pembangunan di Desa Tumbang Masao digunakan untuk pembangunan dalam bidang ekonomi, seperti pembangunan dermaga yang memudahkan masyarakat yang kesehariannya bekerja menggunakan eksistensi Sungai Barito seperti para penangkap ikan dan penambang emas tradisional. Keberadaan dermaga ini sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu mendirikan lembaga berbasis masyarakat seperti kelompok PKK dan Karang Taruna, serta pembangunan bangunan fisik berskala kecil seperti pembangunan dermaga desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh memang sangat terbatas jumlahnya, sehingga tidak mencukupi untuk mendanai pembangunan fisik yang berskala besar. Seperti pada pembangunan kantor desa yang diadakan tahun 2020 kemaren fungsi Alokasi Dana Desa (ADD) hanya sebagai dana yang digunakan untuk membeli perlengkapan kantor desa tersebut seperti alat tulis, meja, kursi, papan tulis, komputer, sound system, peralatan dapur dan hiasan kantor desa tersebut saja. Bukan digunakan sebagai dana bangunan fisiknya.

Meskipun begitu, menurutnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh dan dikelola oleh Desa Tumbang Masao sangat membantu usaha pembangunan yang dicita-citakan.

b. Bagaimana Sistem Pengelolaan dan Proses Penentuan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Masao?

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Masao dikelola langsung oleh perangkat desa, Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Disamping Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Kabupaten, terdapat sumber pendapatan atau keuangan desa yang lainnya, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD).

Keuangan Desa termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mana mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, Sekretaris Desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Bendahara Desa selaku unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab

yang berbeda.⁵⁸ Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan semua pihak. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi desa dalam memanfaatkan dana tersebut.

Adapun proses penentuan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Masao ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut. Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki desa sendiri. Keputusan bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, karena Pemerintah desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil Musdes dan Musrenbangdes berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan Rencana Kerja

⁵⁸Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 “Tentang Pengelolaan Keuangan Desa” BAB I Pasal 1.

Pemerintah desa (RKPDesa), yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di desa. Jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan jika dana sudah masuk ke rekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

Berdasarkan Perbup Murung Raya No 16 Tahun 2011 “Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat rincian tentang penggunaannya sebagai berikut:

- 1) Tunjangan untuk Pemerintah desa
- 2) Biaya operasional Pemerintah desa
- 3) Biaya perjalanan dinas
- 4) Pengadaan alat tulis dan perlengkapan kantor desa
- 5) Biaya makan dan minum untuk acara kepentingan desa

Sedangkan yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- 2) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- 3) Perbaikan lingkungan dan permukiman
- 4) Teknologi tepat guna
- 5) Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- 6) Pengembangan sosial budaya

- 7) Pembinaan lembaga PKK
- 8) Pembinaan lembaga Karang Taruna
- 9) Pembinaan kepemudaan dan olah raga
- 10) Biaya pemilihan kepala desa

Ini hanya serangkaian regulasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, segala bentuk perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat diubah dan dilaksanakan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

c. Bagaimana Proses Penentuan Besaran Dana yang Diterima Oleh Desa?

Besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan oleh Pemerintah desa kepada pemerintah daerah pada tahap pengajuan bukanlah besaran mutlak yang akan diperoleh oleh desa nantinya. Hal ini disebabkan besaran dana tersebut nantinya akan mengalami perubahan karena untuk menentukan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima suatu desa terdapat sebuah rumus seperti yang tertuang dalam Perbup Murung Raya, yaitu rumus yang sederhana, mudah diaplikasikan, dan tersedia datanya. Rumus yang digunakan adalah rumus asas merata dan rumus asas adil.⁵⁹

⁵⁹Lihat PERBUP Murung Raya No 16 Tahun 2011 “Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)” Bag. Rumus Penentuan Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD).

Asas merata. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

Asas adil. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan klasifikasi desa sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 163 Tahun 2005, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumbang Masao tahun 2020/2021. Peneliti akan mencantumkan perbandingan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebelum dan sesudah perubahan. pada tahun 2020/2021 Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan ditahap pengajuan adalah sebesar Rp. 717.975.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan dana yang diperoleh dan kemudian dikelola oleh Desa Tumbang Masao adalah sebesar Rp. 650.208.000,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah). Setelah diajukan besaran jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tumbang Masao tersebut mengalami perubahan berupa pemangkasan anggaran.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan memaparkan tentang besaran Alokasi Dana Desa (ADD) 2020/2021 di Desa Tumbang Masao sebelum dan sesudah perubahan secara rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10 ALOKASI DANA DESA (ADD) 2020/2021 SEBELUM PERUBAHAN

Sumber: Dokumen Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumbang Masao Tahun 2020/2021

No	Jumlah Dana	Sumber
1	Rp. 717.975.000,00	Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Fungsi	Jumlah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 549.475.000.00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 86.000.000.00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 82.500.000.00
Total		Rp. 717.975.000,00

Dibagi menjadi beberapa subbidang yaitu;

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan operasional Pemerintah desa	Rp. 526.075.000.00
2	Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa	Rp. 2.000.000.00
3	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 21.400.000.00
Total		Rp. 549.475.000

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Rp. 86.000.000.00
Total		Rp. 86.000.000.00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Jumlah
1	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 12.000.000.00
2	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 25.000.000.00
3	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp. 14.500.000.00
4	Bidang Kelembagaan Masyarakat (LKMD, LPM, LPMD, PKK dan Karang Taruna)	Rp. 31.000.000.00
Total		Rp. 82.500.000.00

Tabel 4.11 ALOKASI DANA DESA (ADD) 2020/2021

SETELAH PERUBAHAN

Sumber: Dokumen Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumbang Masao Tahun 2020/2021

No	Jumlah Dana	Sumber
1	Rp. 650.208.000,00	Alokasi Dana Desa (ADD)

NO	FUNGSI	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 577.708.000.00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	-
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 72.500.000.00
Total		Rp. 650.208.000,00

Dibagi menjadi beberapa subbidang yaitu;

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	URAIAN	Jumlah
1	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan operasional Pemerintah desa	Rp. 528.679.000.00
2	Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa	Rp. 29.029.000.00
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil	Rp. 10.000.000.00
4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 10.000.000.00
Total		Rp. 577.708.000.00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	-
Jumlah		-

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Jumlah
1	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 12.000.000.00
2	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 15.000.000.00
3	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp. 14.500.000.00
4	Bidang Kelembagaan Masyarakat (LKMD, LPM, LPMD, PKK dan Karang Taruna)	Rp. 31.000.000.00
Total		Rp. 72.500.000.00

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah besaran dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami perubahan pada saat sebelum dan sesudah pengajuan yang berupa pemangkasan dana.⁶⁰

Informan Kedua:

Nama : Kosek Sirait
Pendidikan : SMA sederajat
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Desa Tumbang Masao
Alamat : Desa Tumbang Masao, Rt. 06.
No HP : 082352388950

Menurut informan selaku Sekretaris Desa Tumbang Masao, setelah peneliti menanyakan bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Tumbang Masao, serta kendala apa saja yang menghambat efektivitasnya. Informan memberikan pernyataan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh desa memang digunakan untuk pembangunan. Selain itu, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga untuk belanja dan biaya operasional Pemerintah desa dan tunjangan sebesar 30% dan sisanya digunakan untuk kegiatan pembangunan seperti pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Keputusan penggunaan Alokasi Dana Desa

⁶⁰Kaharano Abda, Bendahara Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao

(ADD) bisa saja berubah sesuai kesepakatan aparat desa dan masyarakat desa.

Menurut Sekretaris Desa Tumbang Masao, jumlah besaran dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tumbang Masao memang efektif dan mencukupi untuk mendanai berbagai program pemberdayaan masyarakat karena pembangunan dalam sektor pemberdayaan masyarakat memang merupakan suatu tujuan dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah pasti mendapatkan pembagian dana yang cukup besar. Pembangunan dalam sektor pemberdayaan masyarakat disalurkan dalam bentuk terciptanya lembaga berbasis partisipasi masyarakat seperti PKK, LKMD, dan Karang Taruna. Lembaga-lembaga ini bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Namun menurut Sekretaris Desa Tumbang Masao, lembaga kemasyarakatan ini tidak berjalan maksimal sesuai dengan fungsinya. Padahal tujuan diadakannya program Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu agar desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Namun jika dalam pengelolaan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut maka otomatis akan mengurangi nilai efektivitas dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri. Menurut Sekretaris Desa Tumbang Masao yang selanjutnya disebut Informan

Kedua fungsi dan tugas-tugas lembaga kemasyarakatan tersebut sebagai berikut:

a. Fungsi dan Tugas PKK

- 1) Turut andil dibidang kesehatan dan KB
- 2) Pelayanan posyandu
- 3) Penyuluhan perilaku hidup bersih
- 4) Pembentukan kelompok tani wanita
- 5) Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat desa.

b. Fungsi dan Tugas LKMD

- 1) LKMD mempunyai tugas membantu Pemerintah desa dan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
 - 2) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
 - 3) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
 - 4) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
 - 5) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

c. Fungsi dan Tugas Karang Taruna

- 1) Karang taruna yang merupakan pilar partisipasi masyarakat sebagai wadah pembinaan pembangunan dan pengembangan generasi muda

dibidang kesejahteraan sosial memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

- 2) Bersama Pemerintah desa untuk menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial
- 3) Pendampingan, pengembangan dan mengarahkan potensi generasi muda didesanya
- 4) Memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada remaja dalam hal keorganisasian, olah raga, minat dan bakat, keterampilan, keagamaan, dan kesenian.
- 5) Menyelenggarakan acara-acara rutin desa seperti selebrasi kemerdekaan Republik Indonesia setiap Agustus, tahun baru muharram dan hijriyah, serta acara-acara hari penting lainnya.

Sebagaimana uraian dari beberapa fungsi dan tugas lembaga kemasyarakatan diatas dapat kita lihat kesemuanya merupakan faktor pendukung pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dilaksanakan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya tak ada satupun program yang terlaksana dengan semestinya. Hal ini disebabkan karena minimnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh para pengurus desa yang bersangkutan. Selain memang tidak ada tindakan pendisiplinan yang dilakukan secara aktif untuk memantau kinerja mereka, kurangnya pelatihan dan penyuluhan tentang bagaimana seharusnya tugas dan kewajiban mereka juga menjadi alasan terjadinya kelalaian mereka dalam bertugas. Tak jarang dalam

melaksanakan tugasnya mereka menggunakan jasa dari pihak ketiga. Lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) nya ini juga membuat tidak maksimal hasil kerja mereka.

Latar belakang pekerjaan para Pemerintah desa yang kebanyakan berprofesi sebagai pekerja serabutan juga menjadi alasan kuat kelalaian mereka dalam bertugas, hal ini dikarenakan tuntutan pekerjaan mereka yang seringkali mengharuskan mereka untuk meninggalkan kampung halaman selama sehari-hari bahkan berminggu-minggu, sehingga program-program desa yang seharusnya direalisasikan karena sudah mendapatkan alokasi dana yang cukup besar menjadi terbengkalai dan tak terurus.⁶¹

Informan Ketiga:

Wawancara selanjutnya peneliti mendatangi kediaman para Informan satu-persatu yaitu satu anggota BPD Desa Tumbang Masao, satu Kaur Pembangunan, satu Kaur Keuangan, dan satu Kasi Umum Desa Tumbang Masao.

Nama : Kaharano Abda, S.Pd.

Pendidikan : S1 Ilmu Sejarah

Pekerjaan/Jabatan : Kaur Keuangan Desa Tumbang Masao

⁶¹Kosek Sirait, Sekretaris Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao 3 Januari 2022.

Alamat : Desa Tumbang Masao, Rt. 03.

No HP : 085386216509

Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, setelah peneliti menanyakan apa saja faktor penghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang pembangunan desa dan terkait bagaimana program pemberdayaan masyarakat yang ada berjalan sejauh ini. Informan menyatakan bahwa faktor penghambatnya selain dari besaran jumlah dana yang diterima relatif terbatas untuk mencukupi kebutuhan desa, juga sasaran penggunaannya yang sering tidak tepat guna. Banyak program lembaga masyarakat yang tidak terealisasi dengan baik.⁶²

Nama : Abdul Kasmi

Pendidikan : SMA Sederajat

Pekerjaan/Jabatan : Anggota BPD Desa Tumbang Masao

Alamat : Desa Tumbang Masao, Rt. 03.

No HP : 082157278004

Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, setelah peneliti menanyakan contoh kasus kelalaian Pemerintah desa

⁶²Kaharano Abda, Kaur Keuangan Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao 3 Januari 2022.

dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka informan memberikan pernyataan bahwa salah-satu contoh kasusnya adalah dari lembaga kemasyarakatan yaitu PKK yang mempunyai program kerja yang banyak memakan biaya namun program yang dilakukan tidak berjalan semestinya dan bahkan merugikan pengeluaran keuangan desa.

Salah-satu program kerja yang dianggap sia-sia yaitu program pembentukan tim tani wanita yang diadakan telah menelan banyak biaya untuk menyiapkan segala kebutuhan bahan pokok untuk kelancaran program tersebut, seperti menyediakan bibit, pupuk, alat bertani, dan perlengkapan pendukung lainnya.

Jika dilihat dari kondisi masyarakat Desa Tumbang Masao yang memang mayoritasnya bertani, program ini sangatlah tidak efektif karena masyarakat tidak terlalu antusias mengikuti program yang sudah tidak asing bagi mereka. Masyarakat lebih memilih untuk bertani secara mandiri untuk menghasilkan uang dari pada bertani hanya sekedar untuk mengikuti program desa. Hal ini berimbas pada kegagalan dari program kerja yang dijalankan. Hal ini mengakibatkan perlengkapan-perengkapan yang sudah disediakan akhirnya tak terurus.⁶³

⁶³Abdul Kasmi, Anggota BPD Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao

Nama : Seri wati
Pendidikan : SMA Sederajat
Pekerjaan/Jabatan : Kaur Pembangunan Desa Tumbang Masao
Alamat : Desa Tumbang Masao, Rt. 03.
No HP : 082253402731

Pada informan diatas peneliti menanyakan bagaimana kinerja lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tumbang Masao khususnya lembaga Karang Taruna. Informan menjelaskan bahwa Lembaga ini memiliki fungsi dan peran yang cukup penting dalam tatanan Pemerintah desa. Lembaga ini juga dinilai lalai dalam melaksanakan tugas yang seharusnya seperti melakukan pendampingan, pengembangan dan mengarahkan potensi generasi muda di desanya. Lembaga Karang Taruna dianggap kurang memperhatikan tugasnya untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada remaja dalam hal keorganisasian, kepemudaan dan olah raga, minat dan bakat, keterampilan, keagamaan, kesenian, dan lainnya.

Para remaja dan masyarakat desa yang berkeinginan untuk mengadakan kegiatan seperti perayaan hari kemerdekaan, pesta menyambut tahun baru, atau kegiatan perlombaan dalam bidang olah raga antar desa, maka masyarakat akan mengusahakannya sendiri. Lembaga Karang Taruna jarang sekali turut serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika ada berlangsungnya kegiatan seperti perlombaan

dalam bidang olah raga, kesenian, pertunjukan minat dan bakat di Desa Tumbang Masao murni karena usaha masyarakat dan bukan karena jasa lembaga Karang taruna.⁶⁴

Nama : Mulyadi

Pendidikan : SMA Sederajat

Pekerjaan/Jabatan : Kasi Umum Desa Tumbang Masao

Alamat : Desa Tumbang Masao, Rt. 03.

No HP : 081357234681

Kepada informan peneliti menanyakan tentang faktor penyebab kegagalan beberapa program dari lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tumbang Masao yang menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut informan, program yang diadakan seringkali tidak diteliti dengan baik kegunaan dan manfaatnya bagi desa serta bagaimana respon masyarakat jikalau program tersebut diadakan. Sehingga seringkali program yang diadakan tidak tepat guna dan kurang menarik perhatian masyarakat. Menurut informan seharusnya program yang diadakan dan menelan banyak jumlah dana tersebut diteliti kembali kegunaan dan manfaatnya bagi masyarakat dan desa, dan bagaimana respon masyarakat seandainya program tersebut diadakan agar dana yang

⁶⁴Seri Wati, Kaur Pembangunan Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao 7 Januari 2022.

terpakai tidak terbuang sia-sia. Masih banyak program yang lebih bermanfaat dimasyarakat seperti mendirikan kelompok aktifitas keagamaan (rebana, habsyi, dll), atau hal-hal bermanfaat lain yang lebih berguna dan menguntungkan bagi desa.⁶⁵

Informan keempat:

Wawancara terakhir yang peneliti lakukan adalah kepada 6 (enam) orang masyarakat Desa Tumbang Masao yang memenuhi kriteria untuk menjadi sumber data. Peneliti juga mendatangi tempat kediaman para informan satu-persatu untuk melakukan wawancara. Identitas para informan adalah sebagai berikut:

Nama	: Wigo Supratman
Pendidikan	: SMP Sederajat
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua RT.03 Desa Tumbang Masao
Alamat	: Desa Tumbang Masao, RT. 03.
No HP	: 082153576895

⁶⁵Mulyadi, Kasi Umum Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao 7 Januari 2022.

Nama : Sarianty
Pendidikan : SMP Sederajat
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang/ Masyarakat Desa Tumbang
Masao
Alamat : Desa Tumbang Masao, RT. 03.
No HP : 082148217471

Kepada kedua informan diatas yang merupakan pasangan suami istri, peneliti melakukan wawancara tentang sejauh mana pengetahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut jawaban yang diberikan oleh para informan, diketahui bahwa pengetahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbatas. Menurut para informan, yang mereka ketahui tentang Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah sebatas bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah-satu sumber pendapatan desa. Selebihnya mereka tidak mengetahui secara rinci mengenai fungsi dan kegunaannya tersebut.

Para informan mengatakan bahwa apapun program yang direncanakan dan dijalankan Pemerintah desa, dan mereka sebagai masyarakat yang tidak paham dan mengerti secara rinci memilih untuk diam saja. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya diri mereka untuk

angkat bicara karena merasa minimnya pengetahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.⁶⁶

Nama : Erla
Pendidikan : SMA Sederajat
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi S1 Prodi Bahasa Inggris
UNPAR/Masyarakat Desa Tumbang Masao
Alamat : Desa Tumbang Masao, RT. 03.
No HP : 081250720438

Kepada informan peneliti menanyakan bagaimana pengetahuannya mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagaimana peran Pemerintah Desa Tumbang Masao dalam memberikan penyuluhan mengenai program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Informan memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda dari informan sebelumnya yaitu bahwa pengetahuan informan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbatas. Peran Pemerintah desa yang memang sangat kurang dalam memberikan sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) ini menjadi alasan besar ketidaktahuan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya memahaminya secara keseluruhan supaya dapat memantau

⁶⁶Wigo Supratman dan Sarianty, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao 9 Januari 2022.

kinerja para pemerintah desa agar dapat menjalankan tugasnya, menjadi sangat pasif karena ketidaktahuan mereka.⁶⁷

Nama : Neni Karmila
Pendidikan : SMA Sederajat
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga/Masyarakat Desa
Tumbang Masao
Alamat : Desa Tumbang Masao, RT. 06.
No HP : 081350397325

Kepada informan peneliti menanyakan tentang apa saja kendala yang membuat lembaga masyarakat yang ada di Desa Tumbang Masao tidak berjalan maksimal. Salah-satu penyebab tidak berjalan maksimalnya lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tumbang Masao adalah Kepala Desa yang tinggal menetap bersama anak istrinya di Kota Puruk Cahu dan hanya sesekali datang ke Desa Tumbang Masao membuat seringkali urusan pemerintahan desa terbengkalai, salah-satunya dalam kepengurusan lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diketuai oleh Istri Kepala Desa juga tak berjalan

⁶⁷Erla, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao 10 Januari 2022.

dengan baik karena kurangnya perhatian dan waktu yang diberikan untuk menjalankan kepengurusannya.⁶⁸

Nama : Tomy Kurniawan
Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang/Masyarakat Desa Tumbang Masao
Alamat : Desa Tumbang Masao, RT. 02.
No HP : 082225595912

Kepada informan peneliti menanyakan perihal bagaimana peran Pemerintah Desa Tumbang Masao dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai sumber tetap pendapatan desa. Menurut informan Pemerintah desa harus berperan aktif dalam memberikan penyuluhan tentang sumber pendapatan desa karena itu merupakan tugas mereka supaya masyarakat bisa memahami dan mengikuti proses dan alur dari pembangunan tersebut agar penggunaan dana yang diterima menjadi terarah. Akan tetapi pada kenyataannya Pemerintah Desa Tumbang Masao kurang berperan dalam

⁶⁸Neni Karmila, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao

memberikan penyuluhan kepada masyarakatnya sehingga masyarakat beranggapan dana yang dikelola oleh desa tidak jelas dan tidak terarah.⁶⁹

Nama : Tiun S Gali
Pendidikan : SMA Sederajat
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Adat Desa TumbangMasao/
Masyarakat Desa Tumbang Masao
Alamat : Desa Tumbang Masao, RT. 02.
No HP : 085348444421

Kepada informan diatas selaku informan terakhir yang peneliti temui, peneliti meminta contoh kasus akibat dari kurang aktifnya musyawarah antara masyarakat dan Pemerintah desa. Informan mengatakan bahwa seringkali program yang diadakan para pengurus desa adalah menurut keputusan para pengurus desa itu sendiri bersama dengan beberapa tokoh masyarakat lainnya yang dianggap lebih paham dan mengerti tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan masyarakat yang hadir saat Musrenbangdes hanya sebatas mendengarkan saja karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Hal ini menyebabkan sering terjadinya salah-paham antar masyarakat dan pengurus desa.

⁶⁹Tomy Kurniawan, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao 9 Januari 2022.

Informan kemudian memberikan contoh kasus yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada saat rapat tentang rencana pembuatan saluran air bersih dari pegunungan untuk masyarakat desa. Pada saat rapat banyak masyarakat yang mengusulkan untuk memakai pipa besar sebagai pipa induk saluran air. Namun, perangkat desa berpendapat bahwa menggunakan pipa yang lebih kecil adalah pilihan yang lebih baik sebab sungai yang dipakai sebagai sumber air utama merupakan sungai yang tidak terlalu besar. Oleh sebab itu, penggunaan pipa besar sebagai pipa induk tidak efektif untuk tekanan air yang tidak terlalu besar, selain itu juga pasti memakan biaya yang besar. Tetapi kenyataannya sekarang membuktikan bahwa pendapat mayoritas masyarakat adalah pilihan yang baik, saluran air bersih yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa ternyata tidak mengalir dengan lancar kesetiap rumah warga, akibatnya banyak warga yang harus bergantian menggunakannya agar air bisa mengalir dirumah warga yang lainnya. Hal ini disebabkan pipa induk yang kecil sehingga debit pasokan air pun sedikit. Menurut informan, salah paham antar masyarakat dan pengurus desa seringkali terjadi sehingga menimbulkan rasa kurang percaya masyarakat kepada para pengurus desa.⁷⁰

⁷⁰Tiun S Gali, Masyarakat Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao

2. Matrik Hasil Wawancara

Tabel 4.12 Matrik Hasil Wawancara

Identitas Informan dan Pertanyaan	Jawaban
<p>Kaharano Abda, S.Pd</p> <p>1. bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya?</p> <p>2. Bagaimana proses penentuan besaran dana yang diterima oleh desa?</p> <p>3. Bagaimana sistem pengelolaan dan proses penentuan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Masao?</p>	<p>1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima memang diperuntukkan sebagai dana pembangunan. Pembangunan yang dimaksud dalam pembangunan Desa Tumbang Masao adalah pembangunan dalam sektor bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) nya dan upaya-upaya terciptanya kesejahteraan desa melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), serta bangunan fisik. Namun, perlu diketahui bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tumbang Masao jika dilihat dari jumlah besaran dana yang diterima dan dikelola sangat terbatas sebagai dana untuk pembangunan. Selain jumlah besaran dana yang terbatas juga karena dana yang diterima juga diprioritaskan untuk operasional pemerintahan desa dan tunjangan aparatur desa. Meski begitu jika dilihat dari besaran dana maka tetap efektif untuk pembangunan.</p> <p>2. Besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan oleh Pemerintah desa kepada pemerintah daerah pada tahap pengajuan bukanlah besaran mutlak yang akan diperoleh oleh desa nantinya. Hal ini disebabkan besaran dana tersebut nantinya akan mengalami perubahan karena untuk menentukan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima suatu desa terdapat sebuah rumus seperti yang tertuang dalam Perbup Murung Raya, yaitu rumus yang sederhana, mudah diaplikasikan, dan tersedia datanya. Rumus yang digunakan adalah rumus asas merata dan rumus asas adil.</p> <p>3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Masao dikelola langsung oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD) yaitu perangkat desa, Kepala Desa</p>

	<p>sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>\Penentuan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Masao, melalui proses musyawarah antara aparatur desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut.</p>
<p>Kosek Sirait</p> <p>1. Bagaimana efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Tumbang Masao serta kendala apa saja yang menghambat efektivitasnya?</p>	<p>1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tumbang Masao memang efektif dan mencukupi untuk mendanai berbagai program pemberdayaan masyarakat karena pembangunan dalam sektor pemberdayaan masyarakat memang merupakan suatu tujuan dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah pasti mendapatkan pembagian dana yang cukup besar. Pembangunan dalam sektor pemberdayaan masyarakat disalurkan dalam bentuk terciptanya lembaga berbasis partisipasi masyarakat seperti PKK, LKMD, dan Karang Taruna.</p> <p>Namun, lembaga kemasyarakatan ini tidak berjalan maksimal sesuai dengan fungsinya. pada kenyataannya tak ada satupun program yang terlaksana dengan semestinya. Hal ini disebabkan karena minimnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh para pengurus desa yang bersangkutan</p> <p>Banyak hal yang mempengaruhi kinerja mereka seperti, kurangnya keterampilan dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas, latar belakang pendidikan yang mayoritasnya cuma tamatan SMA, ditambah lagi kelalaian mereka yang tidak mendapatkan tindakan pendisiplinan yang memberikan efek jera.</p>
<p>1. Apa saja faktor penghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang pembangunan desa?</p> <p>2. Bagaimana program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Tumbang Masao berjalan sejauh ini?</p>	

<p>Kaharano Abda; Bendahara sekaligus Kaur Keuangan Desa Tumbang Masao</p>	<p>Faktor penghambatnya selain dari besaran jumlah dana yang diterima terbatas untuk mencukupi kebutuhan desa, juga sasaran penggunaannya yang sering tidak tepat guna. Banyak program lembaga pemberdayaan masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna yang tidak terealisasi dengan baik.</p>
<p>Abdul Kasmi; Anggota BPD Desa Tumbang Masao (peneliti meminta contoh kasus kelalaian lembaga kemasyarakatan Desa Tumbang Masao)</p>	<p>Pembentukan tim PKK yang mempunyai program kerja yang banyak memakan biaya namun program yang dilakukan tidak berjalan semestinya dan bahkan merugikan pengeluaran keuangan desa. Salah satu program kerja yang dianggap sia-sia yaitu program pembentukan tim tani wanita yang diadakan telah menelan banyak biaya untuk menyiapkan segala kebutuhan bahan pokok untuk kelancaran program tersebut, seperti menyediakan bibit, pupuk, alat bertani, dan perlengkapan pendukung lainnya. Padahal jika dilihat dari kondisi masyarakat Desa Tumbang Masao yang memang mayoritasnya bertani, program ini sangatlah tidak efektif karena masyarakat tidak terlalu antusias mengikuti program yang sudah tidak asing bagi mereka. Masyarakat lebih memilih untuk bertani secara mandiri untuk menghasilkan uang dari pada bertani hanya sekedar untuk mengikuti program desa.</p>
<p>Seri Wati; Kaur Pembangunan Desa Tumbang Masao (peneliti menanyakan bagaimana kinerja lembaga Karang Taruna di Desa Tumbang Masao)</p>	<p>Lembaga ini memiliki fungsi dan peran yang cukup penting dalam tatanan Pemerintah desa. Lembaga ini juga dinilai lalai dalam melaksanakan tugas yang seharusnya seperti melakukan pendampingan, pengembangan dan mengarahkan potensi generasi muda di desanya. Lembaga Karang Taruna di Desa Tumbang Masao dianggap kurang memperhatikan tugasnya untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada remaja dalam hal keorganisasian, kepemudaan dan olah raga, minat dan bakat, keterampilan, keagamaan, kesenian, dan lainnya.</p> <p>Para remaja dan masyarakat desa yang berkeinginan untuk mengadakan kegiatan seperti perayaan hari kemerdekaan, pesta menyambut tahun baru, atau kegiatan perlombaan dalam bidang olah raga antar desa, maka masyarakat akan mengusahakannya sendiri. Lembaga Karang Taruna jarang sekali turut</p>

<p>Mulyadi; Kasi Umum Desa Tumbang Masao (peneliti menanyakan tentang faktor penyebab kegagalan beberapa program dari lembaga masyarakat di Desa Tumbang Masao)</p>	<p>serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika ada berlangsungnya kegiatan seperti perlombaan dalam bidang olah raga, kesenian, pertunjukan minat dan bakat di Desa Tumbang Masao murni karena usaha masyarakat dan bukan karena jasa lembaga Karang taruna.</p> <p>Menurut informan, program yang diadakan seringkali tidak diteliti dengan baik kegunaan dan manfaatnya bagi desa serta bagaimana respon masyarakat jikalau program tersebut diadakan. Sehingga seringkali program yang diadakan tidak tepat guna dan kurang menarik perhatian masyarakat.</p>
<p>1. Apa yang anda ketahui tentang sumber pendapatan desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD)</p> <p>2. Bagaimana peran Pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD)?</p> <p>Wigo Supratman dan Sarianty (pasangan Suami Istri); Ketua RT.03 Desa Tumbang Masao.</p> <p>Erla; mahasiswi/masyarakat Desa Tumbang Masao</p>	<p>Menurut jawaban yang diberikan oleh informan, diketahui bahwa pengetahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbatas. Menurut para informan, yang mereka ketahui tentang Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah sebatas bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah-satu sumber pendapatan desa. Selebihnya mereka tidak mengetahui secara rinci mengenai fungsi dan kegunaannya tersebut. Mereka mengatakan bahwa apapun yang dilakukan dan direncanakan oleh Pemerintah desa, mereka sebagai masyarakat yang tidak mengetahui secara rinci lebih baik diam dan menikmati saja.</p> <p>Informan memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda dari informan sebelumnya yaitu mereka mengatakan bahwa pengetahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbatas. Peran pemerintah yang memang sangat kurang dalam memberikan sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) ini menjadi alasan besar ketidaktahuan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya</p>

<p>Neni Karmila; Ibu rumah tangga/masyarakat Desa Tumbang Masao (peneliti menanyakan perihal kendala yang membuat lembaga kemasyarakatan Desa Tumbang Masao tidak berjalan maksimal)</p>	<p>memahaminya secara keseluruhan supaya dapat memantau kinerja para aparat desa agar dapat menjalankan tugasnya, menjadi sangat pasif karena ketidaktahuan mereka</p> <p>Salah-satu penyebab tidak berjalan maksimalnya lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tumbang Masao adalah Kepala Desa yang tinggal menetap bersama anak istrinya di Kota Puruk Cahu dan hanya sesekali datang ke Desa Tumbang Masao membuat seringkali urusan pemerintahan desa terbengkalai, salah-satunya dalam kepengurusan lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diketuai oleh Istri Kepala Desa juga tak berjalan dengan baik karena kurangnya perhatian dan waktu yang diberikan untuk menjalankan kepengurusannya.</p>
<p>Tomy Kurniawan; masyarakat Desa Tumbang Masao</p>	<p>Menurut informan Pemerintah desa harus berperan aktif dalam memberikan penyuluhan tentang sumber pendapatan desa karena itu merupakan tugas mereka supaya masyarakat bisa memahami dan mengikuti proses dan alur dari pembangunan tersebut agar penggunaan dana yang diterima menjadi terarah. Akan tetapi pada kenyataannya Pemerintah Desa Tumbang Masao kurang berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakatnya sehingga masyarakat beranggapan dana yang dikelola oleh desa tidak jelas dan tidak terarah. Para informan mengatakan bahwa seringkali program yang diadakan para pengurus desa adalah menurut keputusan para pengurus desa itu sendiri bersama dengan beberapa tokoh masyarakat lainnya yang dianggap lebih paham dan mengerti tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan masyarakat yang hadir saat Musrenbangdes hanya sebatas mendengarkan saja karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Hal ini menyebabkan sering terjadinya salah-paham antar masyarakat dan pengurus desa.</p>
<p>Tiun S Gali; Kepala Adat Desa Tumbang Masao (peneliti meminta contoh kasus akibat dari kurangnya</p>	<p>Informan mengatakan bahwa seringkali program yang diadakan para pengurus desa adalah menurut keputusan para pengurus desa itu sendiri bersama dengan beberapa tokoh masyarakat lainnya yang</p>

<p>musyawarah masyarakat dan Pemerintah desa)</p>	<p>dianggap lebih paham dan mengerti tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan masyarakat yang hadir saat Musrenbangdes hanya sebatas mendengarkan saja karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Hal ini menyebabkan sering terjadinya salah-paham antar masyarakat dan pengurus desa. Informan memberikan contoh kasus yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada saat rapat tentang rencana pembuatan saluran air bersih dari pegunungan untuk masyarakat desa. Pada saat rapat banyak masyarakat yang mengusulkan untuk memakai pipa besar sebagai pipa induk saluran air. Namun, perangkat desa berpendapat bahwa menggunakan pipa yang lebih kecil adalah pilihan yang lebih baik sebab sungai yang dipakai sebagai sumber air utama merupakan sungai yang tidak terlalu besar. Oleh sebab itu, penggunaan pipa besar sebagai pipa induk tidak efektif untuk tekanan air yang tidak terlalu besar, selain itu juga pasti memakan biaya yang besar. Tetapi kenyataannya sekarang membuktikan bahwa pendapat mayoritas masyarakat adalah pilihan yang baik, saluran air bersih yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa ternyata tidak mengalir dengan lancar kesetiap rumah warga, akibatnya banyak warga yang harus bergantian menggunakannya agar air bisa mengalir dirumah warga yang lainnya. Hal ini disebabkan pipa induk yang kecil sehingga debit pasokan air pun sedikit. Menurut informan, salah paham antar masyarakat dan pengurus desa seringkali terjadi sehingga menimbulkan rasa kurang percaya masyarakat kepada para pengurus desa.</p>
---	---

C. Analisis Data

Hasil deskripsi wawancara terhadap bagaimana kendala Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya menunjukkan beberapa poin yang telah ditemukan. Secara garis besar data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan penelitian, setelah deskripsi wawancara diperoleh maka perlu ditindak lanjuti dengan menganalisis. Supaya lebih teratur dan sistematis maka data ini disajikan sesuai dengan rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Kendala Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya

.Analisa berdasarkan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki pelaksanaan pembangunan terlaksana secara adil dan merata bagi seluruh wilayah hukum Negara Indonesia tanpa harus melupakan kepentingan suatu daerah demi daerah lainnya.

Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut maka pemerintah menciptakan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah agar pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan daerah lebih

mengenal potensi, ciri khas, budaya serta kebutuhan daerahnya sendiri. Serta agar tidak terjadinya pemusatan tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Analisa berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa maksud adanya otonomi daerah salah-satunya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Desa sebagai kawasan terkecil dalam struktur pemerintahan sangat berperan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan desa bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga segala program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Shah dan Tompson, kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah dilihat dari definisinya adalah kebijakan yang bagus. Mengandung sejumlah nilai positif setidaknya dalam beberapa hal, seperti: mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat memungkinkan adanya partisipasi warga (*citizen participation*), pemberdayaan politik lokal (*empowerment local politics*), dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan perwujudan dari pemberian hak otonom kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri. Melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) ini pemerintah pusat memberikan sebuah wadah bagi Pemerintah desa untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam menjalankan amanah pemerintahan

Analisa berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dan provinsi, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Didalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Adanya program Alokasi Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana tujuan adanya Alokasi Dana Desa tersebut.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan adalah untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai

kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Negara menghendaki dalam pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk menciptakan kegiatan pemerintahan yang bernilai positif seperti terbangunnya rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah desa, meningkatkan rasa tanggung jawab Pemerintah desa terhadap tugas yang diemban, memberikan kesempatan untuk masyarakat pedesaan sebagai pelaku pembangunan, dan yang terpenting adalah kiat membangun kesejahteraan masyarakat.

Sebagai sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, maka dalam pelaksanaannya harus ada mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Hal ini bertujuan untuk memberikan koridor yang jelas bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

The rural household economic development is not only a matter within an individual household, but also related to national policies, village collective leadership and the geographical environment (Pembangunan ekonomi rumah tangga pedesaan tidak hanya merupakan masalah dalam rumah tangga individu, tetapi juga terkait dengan kebijakan nasional, kepemimpinan kolektif desa dan lingkungan geografis).⁷¹

⁷¹Shi, Q. (1999). "Rural household economic development Beijing: China Agriculture" Journal International. 307–342.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Masao menjadi tuntutan bagi Pemerintah desa untuk memiliki kemampuan, wawasan, dan pengalaman yang baik dalam menjalankannya. Pemerintah desa diharapkan mengalami peningkatan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya seperti yang tertuang dalam maksud adanya kebijakan otonomi daerah ini yaitu “meningkatkan tata kelola urusan pemerintahan”.

Akan tetapi, pada kenyataannya di Desa Tumbang Masao belum ada peningkatan yang baik pada kinerja Pemerintah desa nya. Banyak oknum Pemerintah desa yang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Selain dikarenakan rata-rata pendidikan mereka yang hanya tamatan SMA juga karena tidak adanya sanksi yang diberikan yang kemudian menjadikan mereka lalai dalam menjalankan tugasnya, bahkan cenderung merugikan karena kinerja beberapa orang dari pemerintah desa yang buruk akan menghasilkan hasil yang buruk pula. Ini menjadikan upaya pembangunan yang dicita-citakan tak terwujud dengan semestinya

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Pemerintah desa adalah 30% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk operasional Pemerintah desa dalam bertugas, seperti biaya operasional Kepala Desa, BPD, dan biaya operasional tim penyelenggara Alokasi Dana Desa (ADD), Sedangkan 70% lagi dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat

desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Linmas.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tumbang Masao memang digunakan untuk pembangunan. seperti dalam bidang ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan fisik desa berskala kecil, serta juga dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dalam sektor pemberdayaan masyarakat disalurkan dalam bentuk terciptanya lembaga berbasis partisipasi masyarakat seperti PKK, LKMD, dan Karang Taruna.

Garis besar fungsi dan tugas pokok lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut adalah membantu berjalannya visi-misi desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Saling melengkapi dengan Pemerintah desa lainnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Lembaga-lembaga ini harus menjadi wadah bagi masyarakat dan memberikan pembinaan kepada para remaja desa dalam hal keorganisasian, kepemudaan dan olah raga, keterampilan, keagamaan, kesenian, atau yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam upaya pembangunan tersebut, tujuan dari efektivitas ini yang kemudian mendorong seseorang untuk memperoleh keberhasilan dalam profesi dan menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan yang sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah karena banyak sekali kendala dari para penanggung jawabnya seperti kurang cakap atau kurang kompeten dalam menjalankan tugasnya, juga karena kurangnya pelatihan serta pengawasan dari pihak kecamatan selaku penanggung jawab dalam memberikan pengawasan langsung ke pemerintah desa. Kendala-kendala ini menghilangkan nilai efektivitas dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Nilai efektivitas sesuatu dapat diukur dari tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu tingkat Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya ini dapat kita ukur dengan melihat hasil dan pencapaian yang diperoleh Desa Tumbang Masao dari program tersebut apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan terciptanya program tersebut.

Peraturan Bupati Murung Raya No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menghimbau agar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperhatikan keseluruhan prosesnya dengan baik agar tujuan yang dikehendaki bias berjalan maksimal, hal-hal yang harus diperhatikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada tahapan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD di Desa

Tumbang Masao dilihat dari prosedur perencanaannya yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD dengan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat yang diikutsertakan dalam perencanaan maka sudah seharusnya pemerintah desa aktif dalam melaksanakan musyawarah. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang peneliti peroleh dari para informan menunjukkan bahwa terdapat sikap kurang antusias masyarakat untuk mengikuti Musyawarah Desa (Musdes) Dan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang memahami tentang Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, minimnya pengetahuan inilah yang membuat sebagian besar masyarakat bersikap acuh.

Banyaknya masyarakat yang tidak turut berkontribusi dalam tahap perencanaan ini mengakibatkan sedikitnya ide/pemikiran yang menjadi pertimbangan Pemerintah desa dalam mengambil keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan yang aktif dalam setiap musyawarah akan lebih menjamin terlaksananya program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dalam pengawasan yang maksimal. Allah Swt berfirman dalam Al-Quran Surah Ali-Imran ayat: 159 yang berbunyi:

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِطْرَةَ النَّاسِ لَأَفْضَلُ لَكُم مِّنْ حَوْلِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.⁷²

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya melakukan musyawarah terhadap segala keputusan yang akan diambil demi kebaikan bersama. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dikemukakan, maka objek musyawarah dapat mencakup tentang:

- Memelihara kepercayaan
- Membangun sistem pemerintahan yang transparan
- Memudahkan segala urusan

Dari hasil wawancara peneliti dengan para informan dari lapisan masyarakat biasa (bukan Pemerintah desa) dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD) adalah karena kurangnya penyuluhan mengenai program Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri dari Pemerintah desa kepada masyarakatnya. Hal ini

⁷² Aplikasi Kemenag RI. diakses pada 19-04-2022 pk1 19.57 WITA.

mengakibatkan masyarakat dan Pemerintah desa sering berselisih paham mengenai pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Tumbang Masao

2. Pelaksanaan dan Pengelolaan

Berdasarkan pada hasil wawancara, pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan di Desa Tumbang Masao dapat dilihat bahwa pada tahap pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan pada tahun 2020 sampai 2021 banyak mengalami kendala yaitu permasalahan yang kerap terjadi adalah pada para penanggung jawab kegiatan banyak yang kurang kompeten dalam bidangnya. Intuisi mereka yang lemah akhirnya berimbas pada perkiraan yang salah dalam perencanaan program yang akan diadakan. Hal ini mengakibatkan banyak program yang diadakan tidak tepat guna dan tidak sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat Desa Tumbang Masao. Hal ini berimbas pada kegagalan dari program kerja yang dijalankan.

Program-program tersebut pada akhirnya tidak berjalan dengan baik dan terbengkalai sehingga dana yang sudah dicairkan untuk mendanai program tersebut menjadi sia-sia.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya pengawasan dari masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan. Kurangnya pengawasan ini karena masyarakat yang tidak antusias dalam mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan

rasional ini mengakibatkan kurangnya dorongan kepada Pemerintah desa agar melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Pengetahuan masyarakat Desa Tumbang Masao tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbatas. Menurut para informan yang mereka ketahui tentang Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah sebatas bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah-satu sumber pendapatan desa. Selebihnya mereka tidak mengetahui secara rinci mengenai fungsi dan kegunaannya tersebut.

Masyarakat yang kurang paham mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) ini juga menjadi kendala yang serius, karena masyarakat yang seharusnya dapat memantau kinerja para perangkat desa agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjadi sangat pasif karena ketidaktahuan mereka. Hal ini karena peran pemerintah yang memang sangat kurang dalam memberikan sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Penataan Usaha, Laporan dan Pertanggung Jawaban

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bendahara Desa Tumbang Masao diketahui bahwa tahap penataan usaha dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Masao sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan keuangan desa termasuk Alokasi Dana

Desa (ADD) dapat dan sesuai dengan hasil kegiatan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan yang telah dilakukan. Kemudian hasil dari pembukuan ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui jumlah besaran biaya anggaran untuk pembangunan di Desa Tumbang Masao yang sudah terinci dan dibukukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang dan dikelola oleh Pemerintah desa demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat.

Namun permasalahan yang ada adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berpengalaman ini menjadikan pelaksanaan dan pengelolaannya berada dalam kendali satu tangan.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) seharusnya bekerja sama dalam melakukan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, akan tetapi menurut hasil wawancara peneliti dengan Bendahara Desa Tumbang Masao yang terjadi adalah sebaliknya. Informan mengatakan bahwa pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban ini hanya dikerjakan oleh orang yang dianggap kompeten diantara mereka sehingga seringkali terjadi pelimpahan tanggung jawab yang mengakibatkan kualitas hasil kerja yang tak maksimal.

Pemerintah Desa Tumbang Masao kerap mengalami kesulitan dalam melaksanakan langkah-langkah diatas dikarenakan terdapat kendala-kendala seperti yang sudah peneliti paparkan sebelumnya. Allah Swt berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....

Artinya “*Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada engkau supaya engkau menyampaikan (memberikan) amanat kepada ahlinya (pemiliknya)*”.⁷³

Selain permasalahan-permasalahan diatas terdapat juga permasalahan-permasalahan lain yang menjadi kendala efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dalam menunjang pembangunan di Desa Tumbang Masao. Kendala-kendala tersebut akan peneliti jelaskan secara spesifik sebagai berikut :

- a. Kurangnya pelatihan dan penyuluhan tentang bagaimana seharusnya tugas dan kewajiban mereka juga menjadi alasan terjadinya kelalaian mereka dalam bertugas.
- b. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan profesional

⁷³Aplikasi Kemenag RI. diakses pada 19-04-2022 pkl 20.00 WITA.

- c. Lembaga kemasyarakatan yang seharusnya menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- d. Minimnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh perangkat desa yang bersangkutan.
- e. Tidak adanya tindakan pendisiplinan yang dilakukan secara aktif untuk memantau kinerja mereka sekaligus untuk memberikan efek jera.

Permasalahan-prmasalahan diatas jelas bertentangan dengan tujuan adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Murung Raya No 16 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa tujuan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah-satunya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Juga karena secara garis besar tujuan dari terciptanya program Alokasi Dana Desa (ADD) ini seperti yang tercantum dalam Dalam PERBUP Murung Raya No 16 Tahun 2011 “Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)” disebutkan bahwa tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.

Kemudian juga bertentangan dengan maksud Adanya sistem otonomi daerah yang memiliki maksud dan tujuan untuk membantu memaksimalkan urusan pemerintahan seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Analisis berdasarkan teori dalam ilmu hukum *das sollen* dan *das sein*, *das sollen* dapat dipahami hukum sebagaimana seharusnya atau sebagaimana dicita-citakan, sedangkan *das sein* dapat dimaknai sebagai keadaan yang senyatanya terjadi.⁷⁴ Dalam kasus pengelolaan dan pelaksanaan ADD di Desa Tumbang Masao dapat kita lihat perbedaan antara panduan yang ditetapkan

⁷⁴Lyia Aina Prihardiati, Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 5, no. 1, (2021), hlm. 86.

oleh pemerintah daerah dan pelaksanaan di lapangan. Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Perbup Murung Raya 16/2011) diatur bahwa 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk operasional pemerintah desa, sementara sisa yang 70% lagi dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun dalam dokumen APBDes tahun 2020-2021 tercantum bahwa hampir 89% ADD dialokasikan untuk tunjangan dan operasional pemerintah desa, dan besaran alokasi untuk pemberdayaan masyarakat hanya 11%. Bagaimana kita menjelaskan ketidaksinkronan antara pedoman (*das sollen*) dan pelaksanaan (*das sein*) ini?

Dokumen APBDes ini menunjukkan adanya alih fungsi dana. Dalam wawancara dengan Bendahara Desa, perubahan ini dimungkinkan terjadi melalui musyawarah pemerintah desa dan masyarakat yang kemudian juga disetujui oleh Badan Perwakilan Desa.⁷⁵ Alih fungsi ADD ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang bersifat *urgent*; pemerintah Desa Tumbang Masao menilai bahwa ada kepentingan lain yang harus diutamakan. Contoh utama di desa ini adalah kebutuhan masyarakat desa akan air bersih. Pemerintah desa berupaya menyediakannya dengan membangun jaringan pipa dari sumber air di atas gunung menuju ke rumah warga. Proyek ini dibiayai dengan ADD tahun anggaran 2020/2021. Contoh lain adalah kebutuhan alat transportasi air untuk keadaan darurat, terutama mengangkut warga yang sakit parah ke rumah sakit

⁷⁵ Kaharano Abda, Bendahara Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao 29 September 2021.

terdekat atau untuk perjalanan dinas pejabat desa ke kabupaten. ADD digunakan untuk membeli *speed boat*. Menurut tenaga kesehatan Desa Tumbang Masao yang peneliti wawancarai, adanya *speed boat* milik desa ini sangat membantu pekerjaan mereka.⁷⁶ Tak jarang mereka harus menemani pasien yang kritis dan harus diantar ke rumah sakit di kota. Desa Tumbang Masao tidak terhubung melalui jalur darat dengan kabupaten di mana fasilitas kesehatan yang memadai tersedia. Hanya ada sungai dan sebuah *speed boat* dapat menjadi faktor pembeda dalam keadaan darurat, di mana pasien dapat diselamatkan atau tidak.

Dalam data APBDes yang peneliti akses, tidak disebutkan pembelian *speed boat* dan pembangunan jaringan air bersih. Namun hasil wawancara peneliti dengan pengelola ADD menunjukkan bahwa dana untuk kedua hal tersebut diambilkan dari “dana operasional desa”.⁷⁷ Dalam observasi peneliti di lapangan, *speed boat* dimaksud memang ada dan begitu juga dengan pipa jaringan air bersih untuk warga. Meskipun sebagaimana nanti akan peneliti sebutkan, kesalahan perencanaan dalam proyek air bersih ini menyebabkan tujuannya tidak terlaksana dengan baik, namun temuan lapangan menunjukkan bahwa porsi yang besar untuk tunjangan dan operasional pemerintah desa

⁷⁶Jumiarti S. Keb, Bidan Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao 12 Januari 2022.

⁷⁷Kaharano Abda, Bendahara Desa Tumbang Masao, *wawancara pribadi*, Tumbang Masao 29 September 2021.

sesungguhnya sebagian besarnya dipakai untuk penyediaan fasilitas publik juga.

Ini berarti bahwa penggunaan dana desa secara substantif tidak menyimpang dari pedoman umum yang dibuat oleh Bupati Murung Raya (16/2011), walaupun di atas kertas nampaknya terjadi misalokasi ADD. Benar bahwa alokasi untuk pemberdayaan masyarakat desa hanya sekitar 11%, termasuk dana untuk LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Linmas. Namun pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa (layanan kebutuhan dasar berupa air bersih dan fasilitas penunjang layanan kesehatan) tidak termasuk di situ, melainkan diambilkan dari alokasi operasional pemerintah desa.